

Upaya Amerika Serikat Dalam Mencapai Kepentingan Ekonomi-Politik di Venezuela Pada Masa Pemerintahan Nicolas Maduro

Cindy Qorina¹, Mala Mardialina¹, Sirwan Yazid Bustami¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Cindyqorina04@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts made by the United States to support its country's national interests, namely in achieving political-economic interests in Venezuela. This type of research is descriptive qualitative. The data used in this research is secondary data. The data collection technique is done through literature study and documentation through journals, official documents obtained through official websites from organizations or official government websites, as well as articles from international news portals. The data analysis technique in this study used the analysis technique from Miles and Huberman, namely the data collection stage, the data reduction stage, the data presentation stage and the conclusion stage. The results of the research show that the efforts made by the United States to achieve political-economic interests in Venezuela by using economic sanction and unilateral diplomacy (smart power) to overthrow the Venezuelan government have not been successful. However, the economic sanctions imposed by the United States on Venezuela were able to make Venezuela's economic conditions worse.

Keywords: *Economic Crisis, Economic-Political Interests, Economic Sanctions, Nicolas Maduro, Unilateral Diplomacy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendukung kepentingan nasional negara-nya yaitu dalam mencapai kepentingan ekonomi-politik di Venezuela. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi melalui jurnal, dokumen resmi yang diperoleh melalui situs-situs resmi dari organisasi ataupun situs resmi pemerintahan, serta artikel dari portal berita internasional. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan ekonomi-politik di Venezuela dengan menggunakan sanksi ekonomi dan diplomasi unilateral (kekuatan cerdas) untuk menjatuhkan pemerintahan Nicolas Maduro belum berhasil. Namun dengan sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Venezuela mampu membuat kondisi ekonomi Venezuela semakin memburuk.

Kata Kunci: *Diplomasi Unilateral, Kepentingan Ekonomi-Politik, Krisis Ekonomi, Nicolas Maduro, Sanksi Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sering dikaitkan dengan kepentingan nasional dan *power* menjadikan Amerika Serikat sebagai negara dengan pengaruh terbesar di dunia internasional (Asri, 2015). Hampir di semua kawasan, negara adidaya ini memiliki pengaruh yang signifikan, tidak terkecuali di kawasan Amerika Latin. Venezuela merupakan salah satu negara yang banyak memberikan keuntungan bagi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, Venezuela merupakan negara yang harus dikuasai, karena memiliki nilai yang strategis dan mempunyai kekayaan alam yang melimpah.

Di bawah pemerintahan Nicolas Maduro semenjak tahun 2013, Venezuela merupakan negara sosialis yang anti terhadap demokrasi liberal. Hal ini yang kemudian membuat Amerika Serikat berupaya meruntuhkan pemerintahan Maduro yang dianggap dapat menghalangi kepentingan Amerika Serikat di Venezuela dengan berupaya mendemokratisasi Venezuela, karena pada dasarnya Amerika Serikat tidak menyukai pemerintahan yang diktator dan otoriter yang berkuasa lama pada suatu negara. Dengan demikian, Amerika Serikat sangat berambisi meruntuhkan sosialisme di Venezuela dengan demokrasi. Upaya Amerika Serikat mendemokratisasi Venezuela mempunyai motif tersembunyi, dimana di balik upaya untuk mendemokratisasi Venezuela, Amerika Serikat juga memiliki motif lain yaitu kepentingan untuk menguasai sumber daya minyak.

Venezuela sebagai negara penghasil minyak di Kawasan Amerika Selatan menjadi incaran bagi banyak negara termasuk Amerika Serikat (Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), 2017b). Tingginya intensitas ketergantungan Amerika Serikat terhadap stabilitas cadangan minyak bumi dunia mendorong Amerika Serikat untuk turut berpartisipasi baik secara politis maupun ekonomi di sejumlah negara yang menyimpan cadangan minyak bumi dalam jumlah besar. Namun, pemerintah Venezuela yang cenderung diktator dan sosialis menjadi sebuah penghalang bagi Amerika Serikat untuk dapat mengintervensi negara ini. Meski demikian, kondisi internal Venezuela yang tengah mengalami konflik internal dibawah pemerintahan Nicolas Maduro seakan memberikan kesempatan pada Amerika Serikat untuk mengintervensi negara sosialis ini dengan motif mewujudkan kepentingan ekonomi-politiknya.

Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Kondisi Internal Venezuela selama berada di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro? dan 2) Apa kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat di Venezuela dan bagaimana upaya Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan tersebut?

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum merujuk pada pembahasan lebih detail, penting untuk mengetahui beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan tulisan ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebaruan terhadap penelitian sebelumnya dari sudut pandang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Venezuela. Adapun beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang hubungan Amerika Serikat-Venezuela dan pemberian sanksi pertama Amerika Serikat terhadap Venezuela akibat pelanggaran terhadap

HAM yang bisa diajukan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu diklasifikasikan menjadi dua, pertama yang membahas tentang telaah neoliberalisme terhadap kebijakan sosialis, kedua membahas pemberian sanksi akibat pelanggaran HAM, ketiga membahas tentang demokrasi.

Literatur pertama merupakan artikel yang ditulis oleh Yusran ini menggunakan perspektif neoliberalisme dalam menjelaskan reaksi negatif yang ditunjukkan Amerika Serikat terhadap Venezuela akibat nasionalisasi perusahaan minyak yang dilakukan oleh Hugo Chavez (Yusran, 2011, pp. 71–92). Kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan neoliberalis yang diagung-agungkan Amerika Serikat sekaligus sebagai alat menghegemoni negara berkembang. Bagi Amerika Serikat, sebagai negara super power dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, kapitalisme merupakan nilai yang sangat fundamental. Cita-cita Amerika Serikat untuk menegakkan dan mengembangkan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia adalah tujuan penting bagi negara Paman Sam ini selaku pelopor neoliberalisme. Namun, untuk mencapai tujuan itu, Amerika Serikat tentunya akan berhadapan dengan paham-paham ekonomi lainnya yang berseberangan prinsip, atau bahkan menjadi rival bagi neoliberalisme. Amerika Serikat juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai bentuk pertentangan yang dapat meminimalisir eksistensi neoliberalisme. Hal ini penting mengingat bahwa perkembangan paham-paham ekonomi yang asimetris terhadap neoliberalisme tidak dapat diredam.

Sejalan dengan hal tersebut, kepentingan Amerika Serikat untuk menegakkan dan mengembangkan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia akan terhambat karena adanya perlawanan yang berasal dari negara-negara sosialis-komunis seperti Venezuela, dimana Venezuela yang sangat anti terhadap imperialisme Amerika Serikat. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat, pasalnya Amerika Serikat begitu gencar ingin mengintervensi negara sosialis ini karena Venezuela memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia internasional, sekaligus Amerika Serikat juga bercita-cita untuk meruntuhkan paham sosialis di Venezuela tersebut. Penulis setuju dengan literatur di atas, karena keberadaan sosialisme dianggap dapat menghambat kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat.

Literatur kedua adalah artikel ini ditulis oleh Louise Hojen dari AALBORG University dalam Master Thesis-nya (Hojen, 2015). Dalam tulisan ini dijelaskan pemberian sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Venezuela, dimana faktor yang menyebabkan Amerika Serikat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang berupa sanksi terhadap para pejabat Venezuela ialah tuduhan atas 7 pejabat Venezuela yang dianggap melakukan pelanggaran HAM pada tahun 2014. Sanksi pertama Amerika Serikat ini mengarah pada sektor ekonomi dengan memblokir aset dan properti serta membekukan visa para pejabat Venezuela.

Adanya faktor yang menjadi ancaman nasional bagi Amerika Serikat yaitu orientasi politik Venezuela yang berbeda dengan Amerika Serikat, dimana negara Venezuela berada dibawah kekuasaan sosialis otoriter Nicolas Maduro yang sangat anti terhadap Amerika Serikat. Adapun upaya Venezuela dalam meningkatkan perannya dalam geopolitik Amerika Latin melalui pembentukan integrasi regional ALBA dimaknai Amerika Serikat sebagai upaya Venezuela untuk mencari dukungan dan naungan dari negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut dengan

mempromosikan otonomi Amerika Latin yang bebas dari pengaruh Amerika Serikat. Hal ini yang jelas dapat menurunkan citra Amerika Serikat di dunia internasional.

Penulis sependapat dengan artikel ini dalam melihat tujuan Amerika Serikat dalam memberikan sanksi berupa perintah eksekutif yang dijatuhkan pada 7 pejabat Venezuela yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM dan korupsi public di Venezuela. Dibalik pemberian sanksi oleh Amerika Serikat ini, terselip motif tersendiri, dimana Amerika Serikat berupaya menekan pemerintah Venezuela di bawah kekuasaan Nicolas Maduro dengan memberikan ancaman berupa sanksi ekonomi tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga berupaya untuk membalas atas kebijakan-kebijakan sosialis Venezuela yang dianggap dapat menjadi ancaman bagi kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat. Terakhir, tujuan dari pemberian sanksi ini tidak lain untuk menjatuhkan perekonomian Venezuela. Namun, sanksi pertama ini hanya menyasar sebagian kecil dari pejabat Venezuela, maka sanksi ini dikatakan belum dapat mempengaruhi keadaan ekonomi Amerika Serikat.

Literatur ketiga adalah artikel ini ditulis oleh Veramia Bonita (Bonita, 2017). Tulisan ini menjelaskan terkait krisis ekonomi dan pelanggaran HAM yang terjadi di Venezuela tahun 2014 yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi di dalam Inter-American Democratic Charter, dimana Amerika Serikat dan Venezuela merupakan negara anggota Organizations of American States (OAS) yang menyetujui piagam tersebut. Piagam tersebut berisikan bahwa setiap negara anggota yang menganggap bahwa Hak Asasi Manusia telah dilanggar dapat menyajikan klaim atau petisi untuk promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dari artikel ini, terlihat tegasnya Amerika Serikat terhadap suatu negara yang dianggap tidak menghormati demokrasi dengan baik. Adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Venezuela mencerminkan kediktatoran pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pemerintahan Amerika Serikat lantas mengatakan bahwa situasi di Venezuela merupakan “ancaman tidak biasa dan luar biasa untuk keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat”. Bahasa tersebut merupakan bahasa standar hukum Amerika Serikat dalam mengeluarkan sanksi ke beberapa negara.

Penulis mengakui jika demokrasi sebagai instrumen untuk menjalankan kebijakan luar negeri Amerika Serikat senantiasa digaungkan serta menjadi alasan utama di balik seluruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang intervensionis adalah untuk mempromosikan demokrasi. Atas nama demokrasi, pemerintah negara Paman Sam tersebut merasa berhak melakukan intervensi ekonomi dan politik ke negara lain yang dipandang mengabaikan atau menciderai nilai-nilai demokrasi. Namun dalam prakteknya demokrasi yang dianggap sebagai sebuah tujuan oleh Amerika Serikat dijadikan sebagai alat untuk melegalkan kebijakan-kebijakan intervensinya terhadap negara-negara berkembang yang dianggap tidak demokratis seperti Venezuela.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, pengumpulan data, analisis data secara induktif membangun dari rincian ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi

tentang makna data. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder hasil analisa dari penelitian sebelumnya baik itu berupa jurnal-jurnal, artikel-artikel, buku-buku dan melalui portal berita yang kredibel. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari buku-buku teori Hubungan Internasional, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan berita-berita mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Venezuela yang kemudian dapat membantu tulisan ini menjadi satu kesatuan yang utuh.

KERANGKA KONSEPTUAL

KONSEP KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan nasional yang dimiliki suatu negara digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan keamanan negaranya, dimana negara dihadapkan pada politik internasional sebagai arena persaingan dan sarana untuk mendapat kekayaan ekonomi dan kekuasaan negara (Steans & Pettiford, 2009, p. 21). Kepentingan nasional suatu negara timbul akibat terbatasnya sumber daya yang dimiliki, sehingga negara-negara yang bersangkutan perlu mencari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan nasional keluar dari batas-batas negaranya (Warsito & Kartikasari, 2007, p. 32). Dalam mencapai kepentingan nasionalnya setiap negara melakukan interaksi dengan negara lain. Interaksi antarnegara ini dikenal dengan istilah Hubungan Internasional. Pada dasarnya, Hubungan Internasional digunakan untuk mengkaji politik luar negeri yang digunakan suatu negara. Dalam hal ini, politik luar negeri menurut Plano dan Roy Olton (Plano & R. Olton, 1999, p. 117), menjelaskan bahwa politik luar negeri merupakan: Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan dalam suatu negara untuk menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Kepentingan nasional suatu negara tercipta dari kebutuhan negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, politik, militer dan sosial budaya yang dapat dilihat dari kondisi internal negara itu sendiri. Kepentingan nasional dapat memberikan pengaruh dalam politik luar negeri suatu negara, dimana kepentingan nasional tersebut sering dijadikan sebagai tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan terhadap negara lain. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan pada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "kepentingan nasional".

Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Adapun konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah konsep kepentingan yang dikemukakan oleh Daniel S. Papp (1988) dalam bukunya yang berjudul "*Contemporary International Relations*" yang menjelaskan bahwa konsep Kepentingan Nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau hal yang dicita-citakan oleh suatu negara. Dalam hal ini, kepentingan nasional relatif sama diantara semua negara diantaranya kepentingan ekonomi, ideologi, kekuatan, keamanan militer, moralitas dan legalitas.

Amerika Serikat dalam upaya meruntuhkan pemerintahan Nicolas Maduro memiliki dua kepentingan nasional. *Pertama*, kepentingan yang menjelaskan kriteria

ekonomi dapat dijadikan dasar dalam menjelaskan kepentingan nasional. Maksudnya setiap tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh negara semata-mata bertujuan untuk memperkuat perekonomian negaranya, seperti meningkatkan perdagangan negara, memperkuat industri, minyak dan sumber daya alam lainnya yang dianggap sebagai kepentingan nasional. Dengan demikian, pola hubungan yang terjadi antar negara memperlihatkan bagaimana target-target yang ingin dicapai suatu negara yang dinamakan kepentingan ekonomi-politik (Hanifah, 2014, p. 24).

Kedua, kepentingan dalam kriteria ideologi digunakan oleh suatu negara untuk memberikan legitimasi kepada kebijakan negara. Faktor ideologi juga dapat berpengaruh terhadap kepentingan nasional (Hanifah, 2014, p. 24), dimana penyebaran ideologi dianggap merupakan faktor utama dalam politik luar negeri. Ideologi yang juga diartikan sebagai dasar atau landasan yang menjadi penentu suatu negara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan luar negeri negara tersebut. Dengan menyebarkan ideologinya suatu negara akan mendapatkan pengaruh yang lebih besar di dunia internasional sehingga secara tidak langsung suatu negara memperlihatkan adanya aspek-aspek yang menjadi identitas negaranya. Melalui identitas tersebut kemudian dapat dirumuskan apa yang menjadi target serta sejauh mana target tersebut dapat terpenuhi.

Dari penjelasan diatas, dalam menjelaskan kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat di Venezuela penulis menggunakan kriteria ekonomi dan ideologi sebagai kepentingan nasionalnya, dimana Amerika Serikat mempunyai kepentingan ekonomi yang terkait dengan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan energi negaranya dengan berkeinginan menguasai cadangan minyak bumi Venezuela. Kemudian, kepentingan Amerika Serikat kedua yaitu dengan berupaya untuk menyebarkan ideologi/*principles* berkaitan dengan upaya penyebaran ideologi demi menjaga eksistensinya di dunia internasional. Kedua kepentingan ini memiliki keterkaitan satu sama lain, karena apabila Venezuela berhasil menerapkan transisi demokrasi yang lebih baik dan sejalan dengan Amerika Serikat maka akan dapat mempermudah langkah Amerika Serikat untuk menguasai sumber daya minyak bumi negara sosialis tersebut.

KONSEP SMART POWER

Dalam tulisan ini, digunakan konsep *smart power* yang merupakan sebuah instrumen internasional dan di dalamnya terdapat perpaduan dari *hard power* dan *soft power* untuk mewujudkan sebuah manuver politik yang lebih efektif. *Smart power* merupakan kekuatan, kekuasaan dan otoritas suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri bahkan untuk mengatur dan mengontrol negara lain. Kekuatan negara juga dapat berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dalam sistem internasional. Di dalam *smart power*, diplomasi bukan hanya didukung oleh kapabilitas militer, melainkan juga pemanfaatan seluruh kapabilitas yang dimiliki negara seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi serta sosial-budaya. Amerika Serikat dalam kasus ini harus pintar dalam penggunaan *power* yang dimiliki sehingga dapat membentuk strategi yang dinamakan *smart power*.

Untuk memahami konsep *smart power*, penulis menggunakan konsep dari Joseph S. Nye dari artikelnya yang berjudul "*Get Smart. Combining Hard and Soft Power*" dalam tulisan Goldstein (2004, p. 73), yang mendefinisikan *hard power* sebagai

“*the use of coercion and payment*”, dimana kekuatan selalu dihubungkan dengan paksaan dan imbalan, sedangkan *soft power* lebih mengarah pada cara-cara yang lebih halus melalui daya tarik yang dimiliki tanpa melakukan paksaan atau memberikan imbalan. Namun, penulis dalam mendefinisikan *hard power* menggunakan penjelasan dari Daryl Copeland yang lebih komprehensif menjelaskan tentang *hard power* dan akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya. Sedangkan dalam menjelaskan *soft power*, penulis menggunakan penjelasan dari Josep S. Nye karena Nye menjabarkan *soft power* lebih komprehensif dari *hard power*, sehingga penulis memilih untuk menggunakan referensi-referensi dari para ahli untuk memperkaya konsep *hard power* dan *soft power* yang dijelaskan di bawah ini.

Konsep Hard Power

Dalam mendefinisikan *hard power*, Ikram Sehgal dalam artikel yang berjudul “*Power: Hard, Soft, and Smart*” mengartikan penggunaan *hard power* seperti “*power politics, force, and violence*”, dimana *hard power* dapat berupa kekuatan politik dan paksaan serta penggunaan kekerasan yang mengacu pada kekuatan militer dan ekonomi yang dimiliki suatu negara. Sedangkan penggunaan *hard power* menurut Christian Wagner dalam karyanya yang berjudul “*From Hard Power to Soft Power? Ideas, Interaction, Institutions, and Images in India’s South Asia Policy*” sama halnya dengan “*military intervention, coercive diplomacy, and economic sanctions*,” (Wagner, 2005) dimana Wagner melihat bahwa pola dari penggunaan *hard power* seperti intervensi militer, diplomasi yang bersifat paksaan dan sanksi ekonomi menjadi ciri khas dari *hard power*. Penjelasan yang lebih lengkap mengenai *hard power* diberikan oleh Daryl Copeland dalam Nugraha, dimana Copeland menjelaskan definisi *hard power* di dalam artikelnya yang berjudul “*Hard Power vs Soft Power*”. Tulisan ini menjabarkan terkait dengan definisi, tujuan, teknik, nilai, serta *ethos* dari *hard power*.

Penjelasan Copeland menyatakan bahwa definisi dari *hard power* adalah tentang bagaimana meyakinkan musuh untuk mematuhi perintah melalui ancaman dan penggunaan kekerasan, dimana tujuan dari *hard power* adalah berusaha untuk membunuh, menangkap, atau mengalahkan musuh, teknik yang digunakan seperti pemberian sanksi ekonomi dan penggunaan senjata militer. Nilai yang dianut dalam *hard power* adalah bersifat mutlak (*zero sum-game*) artinya keuntungan yang dimiliki atau didapatkan oleh seorang pemain berasal dari kerugian yang dialami oleh pemain lainnya, kemudian *ethos* dari *hard power* dapat menimbulkan rasa takut, penderitaan dan rasa saling curiga. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *hard power* merupakan penggunaan paksaan, sanksi, kekuatan dan paksaan melalui intervensi militer, diplomasi yang bersifat memaksa, serta penggunaan sanksi ekonomi yang dapat menghancurkan lawan (Nugraha, 2018).

Dalam tulisan ini teknik *hard power* yang digunakan Amerika Serikat dalam upaya mengintervensi Venezuela dengan tujuan meruntuhkan pemerintahan sosialis Nicolas Maduro menggunakan kekerasan ekonomi berupa pemberian sanksi-sanksi ekonomi terhadap Venezuela. Kemudian nilai yang dianut Amerika Serikat adalah bersifat mutlak (*zero sum-game*), dimana kepentingan ekonomi-politik yang hendak diraih oleh Amerika Serikat berasal dari kerugian yang dialami oleh Venezuela, pasalnya segala bentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Venezuela bertujuan untuk menjatuhkan ekonomi dan mengarah pada upaya menjatuhkan

pemerintahan Nicolas Maduro. Hal ini lantas berakibat pada penderitaan yang dialami oleh Venezuela akibat sanksi-sanksi ekonomi yang semakin menyulitkan bagi Venezuela.

Konsep Soft Power

Menurut Nye, *soft power* merupakan suatu kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang dapat mengontrol pihak lain untuk membuatnya melakukan sesuatu yang belum tentu ingin mereka lakukan (“*an ability to do things and control others, to get others to do what they otherwise would not*”) (Nye, 1990). *Soft power* dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain dengan cara-cara persuasif dari pada dengan cara-cara koersif ataupun dengan memberikannya imbalan. Nye juga mengatakan bahwa “*Soft power is the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments*” (Nye, 2004, p. 1) dimana negara dapat mencapai apa yang diinginkannya melalui daya tarik yang dimiliki tanpa melakukan paksaan, kekerasan atau memberikan imbalan.

Dalam tulisan ini, sumber penggunaan *soft power* oleh Amerika Serikat dalam upaya intervensinya di Venezuela menggunakan ideologi sebagai sebuah instrumen atau alat yang melegalkan tindakan atau kebijakan Amerika Serikat untuk mengintervensi negara lain. Dalam hal ini, Amerika Serikat mengangkat isu pelanggaran HAM dengan menganggap pemerintah sosialis Venezuela melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran yang menuntut adanya reformasi dalam bidang ekonomi dan politik. Amerika Serikat berupaya menggiring pemikiran masyarakat Venezuela dengan membangun stigma baik terhadap demokrasi yang dianggap lebih memberikan kebebasan dengan mendeklarasikan Juan Guaido sebagai representasi dari demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat dimaknai sebagai diplomasi unilateral atau pengakuan secara sepihak Amerika Serikat terhadap Juan Guaido selaku rival politik Nicolas Maduro (Nye, 2004, p. 1).

Namun, dalam pelaksanaannya *soft power* tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya *hard power*, begitu pula sebaliknya. Sehingga, pakar diplomasi S. L. Roy menyatakan bahwa hakikat diplomasi yang sukses adalah kemampuan menempatkan penekanan yang tepat pada setiap keadaan tertentu dalam satu atau lebih instrumen diplomasi, termasuk penggunaan kekuatan (Roy, 1984, p. 19). Pernyataan ini mengimplikasikan apabila negosiasi damai dilaksanakan, kekuatan koersif akan selalu berdiri di belakang. Dengan kata lain, kekuatan koersif siap siaga untuk digunakan bila dibutuhkan, ia dibawa ke depan sebagai ancaman. Jika ancaman gagal, maka kekuatan koersif digunakan secara terbuka. Kekuasaan Amerika Serikat atas pemberian sanksi ekonomi sebagai sarana pemaksa atau alat kekerasan merupakan bagian dari diplomasi dalam dunia yang anarki (Roy, 1984, p. 20). Jadi *smart power* adalah kunci sukses diplomasi yang cerdas (*smart diplomacy*).

Oleh karena itu, dalam tulisan ini digunakan konsep *smart power* untuk menjelaskan upaya yang digunakan Amerika Serikat dalam intervensinya di Venezuela, dimana dalam penggunaan *smart power* terdapat dua kekuatan yaitu *hard power* dan *soft power*. Dalam kasus yang diteliti ini penggunaan *hard power* oleh Amerika Serikat lebih mengarah kepada pemanfaatan kekuatan ekonomi yang dimilikinya dengan memberikan sanksi ekonomi untuk menjatuhkan perekonomian Venezuela. Sedangkan

penggunaan *soft power* lebih mengarah kepada penggunaan kekuatan politik yang secara perlahan semakin memperkeruh kondisi internal di Venezuela. Penggunaan *soft power* oleh Nye dapat diibaratkan dengan “membunuh tanpa menyentuh”, sehingga, *soft power* juga dikatakan sebagai upaya yang efektif dan efisien.

Amerika Serikat yang berupaya membangun kepercayaan dan perspektif terhadap masyarakat Venezuela dengan menganggap pemerintahan Nicolas *Maduro* merupakan pemerintahan diktator gagal yang tega membiarkan rakyatnya hidup dalam krisis ekonomi yang parah. Selain itu, dalam pidatonya di Florida International University Donald Trump memperingatkan ‘bahaya sosialisme’ terhadap warga negara Venezuela yang tersebar di Amerika Serikat (VOA Indonesia, 2019b). Dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat akan selalu berupaya menjatuhkan sosialisme di Venezuela dengan menggunakan segala macam cara untuk mencapai kepentingan ekonomi-politik di Venezuela. Dengan demikian, *smart power* merupakan strategi yang ampuh dan mudah bagi negara sekelas Amerika Serikat dalam upayanya mendapatkan kepentingan nasional di negara sosialis tersebut.

Bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat, penggunaan *smart power* dapat memberikan poin lebih dalam menjalankan intervensinya di Venezuela, dengan mengombinasikan *hard power* dan *soft power* merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, karena dalam upaya untuk mempengaruhi dan mengontrol negara lain diperlukan *hard power* yang dapat memberikan ancaman terhadap kebijakan ekonomi yang dapat melemahkan negara tersebut. Selain itu, penggunaan *soft power* juga dirasa cukup tepat untuk diterapkan, karena dalam realisasinya *soft power* bekerja sangat efisien, sehingga Venezuela perlahan-lahan akan mengalami dampak yang signifikan akibat *soft power* dari Amerika Serikat tersebut. Dengan demikian, *smart power* merupakan kombinasi yang baik dari *soft power* dan *hard power* dijadikan sebagai strategi yang tepat untuk berupaya menjatuhkan pemerintahan Nicolas *Maduro*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONDISI INTERNAL VENEZUELA SELAMA BERADA DI BAWAH PEMERINTAHAN NICOLAS MADURO

Krisis Ekonomi dan Politik Venezuela

Krisis ekonomi di bawah kepemimpinan *Maduro* merupakan krisis terbesar yang dialami Venezuela. Venezuela merupakan negara yang lebih dari 50% pendapatan nasionalnya bergantung pada sumber daya minyak dan 95% pendapatan ekspor diperoleh dari ekspor minyak mentah (Elinda, 2017, p. 121). Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar oleh Venezuela hingga mencapai 37.4 Miliar U.S. Dollar (USA International Business Publications, 2007, p. 28). Namun, harga minyak rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga tahun 2016 membuat perekonomian Venezuela tetap mengalami keterpurukan.

Berdasarkan data World Bank, pada bulan Januari 2012 harga minyak mentah berada di kisaran 107,07 U.S merosot menjadi 61,19 U.S. Dollar/bbl di tahun 2016. Bersamaan dengan turunnya harga minyak global, pada tahun 2012 hingga tahun 2017 Venezuela mengalami lonjakan inflasi yang disebabkan oleh jatuhnya nilai mata uang Bolivar di pasar valuta asing. Pemerintah Venezuela mencetak banyak uang

untuk membiayai anggaran pengeluaran negara yang mengalami devisa sehingga menurunkan nilai tukar mata uang Bolivar (Grant, 2016, p. 77). Pada saat yang sama, produksi minyak Venezuela mengalami penurunan. Hal tersebut yang menyebabkan penurunan pendapatan hingga terjadinya inflasi parah di Venezuela.

Pada awal tahun 2014 terjadi demonstrasi beruntun dari kalangan mahasiswa di Venezuela. Protes bermula ketika seorang siswi meninggal akibat menjadi korban pemerkosaan. Para mahasiswa berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan mengatasi inflasi yang juga terjadi, namun beberapa mahasiswa justru ditangkap. Kelompok pendukung pemerintah (Kolektivos) menanggapi aksi protes mahasiswa dengan melakukan penembakan kepada beberapa mahasiswa yang berunjuk rasa pada 11 Februari 2014 tersebut. Permasalahan mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Maduro semakin diperkeruh dengan adanya keterlibatan oposisi. Para pimpinan oposisi memanfaatkan kejadian ini untuk menjatuhkan Maduro dengan ikut berunjuk rasa bersama mahasiswa dan masyarakat.

Kehadiran oposisi berhasil mendapat perhatian dari masyarakat. Unjuk rasa yang awalnya bertujuan untuk menuntut peningkatan keamanan dan penyelesaian masalah ekonomi oleh pemerintah Maduro, berubah menjadi unjuk rasa menentang pemerintah. Tindakan tegas dari petugas keamanan menciptakan demonstrasi lebih besar dari masyarakat yang menentang pemerintahan. Para demonstran anti-pemerintah menuntut Maduro segera mengundurkan diri sebagai Presiden karena telah gagal dalam mengatasi krisis ekonomi (Hellinger, 2015, p. 400).

Perpecahan dalam perpolitikan tersebut bahkan menyebabkan kekacauan ekonomi di akhir tahun 2012 berlanjut menjadi krisis di tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yang kemudian harus memaksa masyarakat untuk menuntut kesejahteraan melalui unjuk rasa (VOA Indonesia, 2018). Namun, di tengah kisruh domestik, pemerintah justru semakin otoriter dan melawan aspirasi masyarakat dengan sikap keras dan sewenang-wenang. Tindakan pemerintah Maduro inilah yang pada akhirnya membuka jalan bagi kelompok oposisi untuk kembali bangkit dan mendapat dukungan dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat.

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DI VENEZUELA

Dukungan yang diberikan Amerika Serikat terhadap lawan politik Nicolas Maduro tersebut menimbulkan berbagai macam perspektif, pasalnya setiap tindakan atau kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara adidaya ini pasti memiliki tujuan tertentu. Adanya dukungan AS pada pihak oposisi di Venezuela, Donald Trump berharap Guaido mampu melengserkan Maduro dari jabatannya sebagai presiden Venezuela. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya keinginan untuk mendapat keuntungan atau kepentingan tertentu dari suatu negara (Bevugni et al., 2015).

Dalam tulisan ini, Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan luar negerinya terhadap Venezuela semata-mata bertujuan untuk mendapatkan kepentingan ekonomi dengan berupaya memenuhi kebutuhan industri dalam negerinya, dimana kebutuhan akan sumber minyak bumi ini dapat terpenuhi dari negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Iran, Libya dan tentunya Venezuela. Disamping kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi juga merupakan kepentingan yang ingin dicapai

Amerika Serikat, dimana dengan menggaungkan ideologi demokrasi liberalnya Amerika Serikat bertekad ingin menjaga eksistensinya di dunia internasional.

Kepentingan Ekonomi

Konsentrasi Amerika Serikat terhadap negara berkembang produsen minyak yang tidak stabil dan rawan konflik mulai meningkat terbukti dari banyaknya negara penghasil minyak yang diintervensi oleh Amerika Serikat seperti Libya, Iran dan Venezuela. Tingginya intensitas ketergantungan Amerika Serikat terhadap cadangan minyak bumi mendorong Amerika Serikat untuk berpartisipasi (intervensi) di kawasan yang menyimpan cadangan minyak bumi dalam jumlah besar, salah satunya di negara Venezuela. Berikut merupakan tabel cadangan minyak negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia (Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), 2017b).

Tabel 4.1. Jumlah Cadangan Minyak Mentah Negara Terbesar di Dunia (Dalam Ukuran *Million Barrel*)

Negara	Tahun		Tahun		
	2012	2013	2014	2015	2016
Venezuela	297,735.0	298,350.0	299,953.0	300,878.0	302,250.0
Saudi Arabia	265,850.0	265,789.0	266,578.0	266,455.0	266,208.0
Iran	157,300.0	157,800.0	157,530.0	158,400.0	157,200.0
Irak	140,300.0	144,211.0	143,069.0	142,503.0	148,766.0
Kuwait	101,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0

Sumber: (Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), 2017a)

Venezuela mencatatkan diri sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia mengalahkan Arab Saudi. Menurut publikasi tahunan organisasi negara-negara peng-ekspor minyak (OPEC), negara yang kini dipimpin Nicolas Maduro ini memiliki cadangan minyak bumi sebesar 302 miliar barel. Urutan berikutnya adalah Arab Saudi dengan 266 miliar barel minyak. Data per akhir 2017 lalu, jumlah cadangan minyak negara-negara OPEC mencapai 1.214,21 miliar barel.

Angka ini mencapai 81,89 persen dari total cadangan minyak seluruh negara. Sedangkan untuk cadangan minyak bumi negara-negara non-OPEC jumlahnya sebesar 268,56 miliar barel (18,11%) (Kata Data, 2018). Ketersediaan minyak bumi di Venezuela menjadikan negara ini semakin menjadi incaran bagi negara-negara industri besar untuk berinvansi ke Venezuela jelaslah bahwa minyak merupakan sektor terpenting dalam perekonomian Venezuela dan ekspor minyaknya juga menutupi kebutuhan minyak Amerika Serikat. Namun, pasca nasionalisasi perusahaan minyak yang dilakukan oleh Chavez membuat perusahaan minyak Amerik Serikat harus angkat kaki dari negara ini, akibatnya Amerika Serikat kehilangan perusahaan minyak untuk supply kebutuhan industri negaranya. Oleh karena itu, Amerika Serikat berupaya untuk menguasai kembali minyak bumi dari negara sosialis ini.

Keuntungan Penyebarluasan Ideologi

Selama Perang Dingin Amerika Serikat telah tampil sebagai negara *Champion of Democracy* dan *The Guardian of Democracy*, serta menjadi negara yang senantiasa mensponsori penyebaran demokrasi di berbagai belahan dunia. Keberpihakan Amerika Serikat pada demokrasi tidak dapat dilepaskan dari munculnya keyakinan yang besar dalam diri bangsa Amerika Serikat bahwa demokrasi merupakan prinsip dasar pembangunan watak bangsa. Demokrasi telah menjadi American Ethos dan menjadi nilai-nilai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat selama ratusan tahun. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat kuatnya posisi demokrasi sebagai isu penting dalam politik luar negeri Amerika Serikat saat ini, disamping faktor-faktor lain seperti dinamika kesejarahan dalam mempraktekkan nilai-nilai demokrasi selama ratusan tahun dan kemunculannya sebagai kekuatan unilateral pasca Perang Dingin membuat kedudukan demokrasi menjadi semakin kokoh.

Disisi lain, demokrasi juga dijadikan sebagai alat untuk memperkuat kedudukannya di dunia internasional, karena semakin banyak negara yang menganut ideologi demokrasi maka semakin banyak pula sekutu-sekutu yang dimiliki Amerika Serikat (VOA Indonesia, 2019a). Hal ini yang kemudian membuat Amerika Serikat semakin mudah dalam mendapat legitimasi di dunia internasional atas kebijakan luar negeri yang dibuat. Demokrasi juga akan mempermudah Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan ekonomi-politiknya, sehingga Amerika Serikat terus mengupayakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan pemerintahan sosialis Maduro. Di samping keinginan untuk menjaga eksistensi demokrasi, tujuan Amerika Serikat dalam mengupayakan demokrasi di Venezuela ialah untuk mencegah pengaruh atau dominasi Cina dan Rusia yang mulai melirik kawasan Amerika Latin sebagai kawasan yang potensial. Hal ini tentu dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat.

STRATEGI AMERIKA SERIKAT MENJATUHKAN PEMERINTAHAN NICOLAS MADURO

Berdasarkan konsep *smart power* yang menggabungkan dua kekuatan (*hard power dan soft power*) dalam satu upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya di Venezuela. Dari segi *hard power* penjelasan dari Daryl Copeland menyatakan bahwa tujuan dari pemberian sanksi ekonomi ini ialah berusaha untuk membunuh, menangkap, atau mengalahkan musuh dengan teknik yang digunakan seperti pemberian sanksi ekonomi dan penggunaan senjata militer. Nilai yang dianut dalam *hard power* adalah bersifat mutlak (*zero sum-game*) artinya keuntungan yang dimiliki atau didapatkan oleh seorang pemain berasal dari kerugian yang dialami oleh pemain lainnya, kemudian *ethos* dari *hard power* dapat menimbulkan rasa takut, penderitaan dan rasa saling curiga. Sejalan dengan hal tersebut, Amerika Serikat menggunakan teknik pemberian sanksi ekonomi dalam strategi *hard power*-nya.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengalahkan atau menjatuhkan pemerintah Venezuela dari segi ekonomi yang dianggap tidak dapat membawa kesejahteraan

terhadap rakyatnya. Jika pemerintahan sosialis Nicolas Maduro tumbang akibat krisis ekonomi di negaranya maka dapat dikatakan nilai yang terjadi bersifat mutlak, artinya kemenangan yang diperoleh Amerika Serikat berasal dari kerugian yang didapatkan dari pemerintah Nicolas Maduro, dalam pemberian sanksi-sanksi tersebut tentunya akan menimbulkan penderitaan terhadap perekonomian Venezuela yang sudah terpuruk menjadi semakin terpuruk dan kacau. Berikut beberapa sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Nicolas Maduro.

Pembekuan Aset

Amerika Serikat memberikan sanksi yang berupa Perintah Eksekutif 13692 tentang Pemblokiran Aset dan Pembatasan Visa kepada 7 Pejabat Venezuela atas Pelanggaran HAM. Pemberian sanksi diiringi dengan pernyataan bahwa situasi Venezuela yang tidak demokratis menjadi ancaman bagi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Amerika Serikat memutuskan memberikan sanksi atas dasar ketidakamanan yang didapat dari Venezuela dan untuk menyikapi pelanggaran HAM yang dituduhkan Amerika Serikat kepada pemerintah Venezuela (U.S Treasury, 2015, p. 5). Sanksi ini diperpanjang dengan dikeluarkannya Perintah Eksekutif 13884: Memblokir Properti Pemerintah Venezuela Perintah Eksekutif 13884 ini dirancang untuk lebih intensif meningkatkan tekanan pada pemerintahan *Nicolás Maduro* dengan memblokir semua kepentingan properti individu dan properti pemerintah Venezuela yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat dengan memberi wewenang kepada Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi kepada orang tambahan yang telah membantu atau mendukung pemerintah Venezuela, termasuk melalui penyediaan barang atau jasa.

Sanksi Keuangan

Sanksi ketiga berupa Perintah Eksekutif 13808 Pembatasan Akses Keuangan: Penambahan sanksi baru ini dilakukan sebagai tekanan tambahan dari Amerika Serikat terhadap Presiden Maduro yang mengadakan pemilihan Majelis Konstituante pada bulan Juli 2017 yang dianggap tidak sah. Pemilihan ini menjadi kontroversial sebab terjadi kejanggalan, dimana dari pernyataan otoritas pemilihan negara Venezuela mengatakan bahwa lebih dari 8 juta pemilih pergi ke tempat pemilihan namun, pihak oposisi memperkirakan hanya 2,5 juta surat suara saja yang diberikan. Pada pemilihan ini Partai Sosialis yang merupakan partai asal *Maduro* memenangkan sekitar 545 kursi di Majelis baru (Ellsworth, 2017).

Sanksi keempat yaitu Perintah Eksekutif 13827: Pelarangan Pembelian Mata Uang Digital Venezuela. Sanksi ini dikeluarkan atas respon terhadap peluncuran mata uang digital Venezuela yang bernama Petro. Petro dibuat sebagai upaya Venezuela untuk melengkapi mata uang Venezuela Bolivar Fuerte (VEF) dan menghindari sanksi Amerika Serikat. Sanksi kelima yaitu Perintah Eksekutif 13835: Pelarangan Pembelian Mata Uang Venezuela. Sanksi ini berisikan larangan pembelian mata uang atau utang Venezuela oleh orang Amerika Serikat ataupun yang sedang berada di Amerika Serikat. Perintah Eksekutif ini dikeluarkan sebagai langkah tambahan Amerika Serikat terhadap kegiatan Maduro yang salah urus ekonomi, korupsi dan penindasan terus-

menerus terhadap oposisi politik serta, respon dari keputusan Maduro dalam melakukan pemilihan yang dianggap tidak bebas atau adil.(U.S Treasury, 2015, p. 1).

Sanksi keenam yaitu Perintah Eksekutif 13850: Pelarangan Melakukan Transaksi: sanksi ini bertujuan untuk menekan Venezuela setelah sebelumnya mengeluarkan beberapa Perintah Eksekutif, yang dikeluarkan pada 1 November 2018. Dalam President Documents E.O 13850 dijelaskan bahwa perintah atau sanksi ini merupakan respon dari tindakan pemerintahan Maduro dan orang-orang terkait yang telah melakukan penjarahan kekayaan Venezuela untuk tujuan korup mereka sendiri, menurunkan infrastruktur dan lingkungan alam Venezuela melalui manajemen ekonomi yang salah dan praktik-praktik industri pertambangan penyitaan, serta mengatalisasi krisis migrasi regional dengan mengabaikan kebutuhan dasar rakyat Venezuela (U.S Treasury, 2015, p. 1). Dalam hal ini, properti atau kepentingan milik pemerintah Venezuela yang berada dalam kepemilikan atau kendali Amerika Serikat tidak boleh ditransfer, dibayar, diekspor, ditarik, atau ditangani: (U.S Treasury, 2015, p. 1)

Terbukti, kondisi ekonomi Venezuela pasca pemberian sanksi-sanksi ekonomi tersebut menjadi sangat tidak stabil bahkan krisis ekonomi yang sejak tahun 2013 terus-menerus memburuk dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan sekitar 3 juta warga negara Venezuela terpaksa bermigrasi ke negara-negara Amerika Latin. Menurut Caracas Chronicles dalam tulisan Riza yang dimuat di Tempo, pada Februari 2018 sekitar sebanyak 61.2% penduduk Venezuela hidup dalam keadaan miskin absolut, dimana orang-orang tidak punya uang untuk membeli kebutuhan pokok. Akibatnya sekitar 87.5% warga negara Venezuela mengandalkan bantuan distribusi pangan tersubsidi dari pemerintah. Dari kondisi ekonomi ini tidak heran jika Venezuela mengalami hiperinflasi hingga 10 juta persen pada tahun 2019 menurut data IMF yang dilansir Reuters (Riza, 2019). Kondisi semacam ini semakin membuat pemerintah Venezuela untuk berupaya keluar dari tekanan pemerintah Amerika Serikat. Namun akan sulit selama sanksi-sanksi Amerika Serikat masih berlaku di negara sosialis ini.

Diplomasi Unilateral

Konspirasi global menggusur Presiden Venezuela Nicolas Maduro sedang gencar dilakukan oleh Amerika Serikat. Menariknya, aktor intelektual yang dimainkan sebagai motor penggerak menggalang beberapa negara Amerika Latin mendukung Juan Guaido sebagai Kepala pemerintahan transisi Venezuela adalah Chrystia Freeland, Menteri Luar Negeri Kanada. Ternyata penggalangan kekuatan untuk melengserkan *Maduro* sudah dirancang Menlu Freeland sejak Agustus 2017, dengan terbentuknya Lima Group yang terdiri dari 14 negara Amerika Latin. Antara lain Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, dan Saint Lucia. Namun demikian, 14 negara Latin itu juga berada dalam arahan dari beberapa negara besar seperti Inggris, Jerman, Uni Eropa, Prancis, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Ekuador (CNN Indonesia, 2019).

Melalui gerakan internasional tersebut, Chrystia Freeland dan Presiden Trump sebagai aktor intelektual utama berhasil menciptakan prakondisi untuk melengserkan Presiden Maduro melalui skenario kudeta dan menabrak konstitusi Venezuela dan skenario ini sudah disiapkan sejak tiga tahun yang lalu. Sebagaimana pengakuan Ben Roswell, Duta Besar Kanada untuk Venezuela di sebuah media Kanada Ottawa Citizen pada 19 Agustus 2017, kementerian luar negeri Kanada menetapkan program

pemakzulan Presiden Maduro sebagai prioritas utama untuk mendapatkan dukungan penuh atas nama penegakan demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia (Azzam, 2019). Dengan demikian, seperti dilansir oleh Associated Press pada Januari 2019 lalu, Juan Guaido yang saat ini mengklaim sebagai presiden sah Venezuela, beberapa waktu sebelumnya sudah melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa negara untuk mendapat dukungan politik.

Negara-negara itu diantara lain ialah Amerika Serikat, Colombia dan Brazil. Sekaligus memberikan briefing terkait strategi demonstrasi massa pada saat Maduro mengumungkan kemenangannya pada pemilu presiden. Mengamati fakta-fakta tersebut, aksi internasional melengserkan pemerintahan Maduro itu dimotori oleh para pemimpin sayap kanan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, beberapa negara Amerika Latin maupun Kanada, yang mana Menlu Chrystia Freeland sendiri juga berhaluan sayap kanan, bahkan punya kecenderungan kuat mendukung fasisme. Sama halnya dengan Juan Guaido yang haluan ekonomi politiknya adalah liberal, kemudian mentornya sewaktu Guaido kuliah manajemen politik di Universitas George Washington adalah ekonom Luis Enrique Berrizbeitia yang berhaluan neoliberal pula. Tak diragukan lagi, dorongan kuat untuk menggulingkan Maduro dari tampuk kekuasaan didorong keinginan kuat untuk mendemokratisasi liberalkan perekonomian Venezuela.

Dengan didukung kondisi ekonomi dan politik Venezuela, Donald Trump semakin gencar mempromosikan transisi demokrasi yang menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik, dimana demokrasi menjanjikan kebebasan berpendapat terhadap seluruh warga negara, dengan demikian tidak ada lagi pelanggaran terhadap HAM karena aspirasi dari rakyat Venezuela tertampung dengan baik. Disamping itu, Amerika Serikat yang berupaya membangun kepercayaan dan perspektif terhadap masyarakat Venezuela dengan menganggap pemerintahan sosialis Nicolas Maduro merupakan pemerintahan diktator gagal yang tega membiarkan rakyatnya hidup dalam krisis ekonomi yang parah. Amerika Serikat berupaya menyadarkan rakyat Venezuela untuk mementingkan kesejahteraan ekonomi daripada memilih pemerintah yang mementingkan dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Melihat hubungan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela selama masa pemerintahan Nicolas Maduro, kedua negara tidak pernah berada dalam situasi damai dikarenakan perbedaan ideologi hingga balas-membalas serangan diplomatik dilancarkan oleh kedua negara, karena sejatinya Amerika tidak menyukai ideologi sosialisme yang menghalangi kepentingan nasional Amerika Serikat. Melihat kondisi internal Venezuela dengan krisis ekonomi dan kekacauan politiknya lantas kemudian menarik perhatian Amerika Serikat untuk ikut campur dalam memanfaatkan keadaan internal Venezuela yang kacau tersebut dengan maksud untuk memperburuk situasi yang ada. Dengan memihak pada partai oposisi atau partai sayap kanan Venezuela, Amerika Serikat optimis mampu meruntuhkan rezim sosialis Nicolas Maduro.

Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap pemerintah Venezuela tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional negaranya dengan berkepentingan untuk menguasai lahan minyak Venezuela yang merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Dari segi ideologi, semangat

principless atau menyebaluaskan ideologi demokrasi liberal ke seluruh penjuru nigari merupakan cita-cita utama bangsa Amerika Serikat pasca berakhirnya Perang Dingin. Hal ini tidak lain tujuannya untuk melebarkan pengaruhnya di dunia internasional dan yang terpenting untuk melawan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan demokrasi liberal seperti sosialisme di Venezuela.

Terkait dengan upaya yang digunakan Amerika Serikat dalam mengintervensi Venezuela ialah dengan menggunakan smart power sebagai langkah cerdas Amerika Serikat, dimana penggabungan dari hard power dan soft power yang merupakan kombinasi yang menarik untuk dijadikan sebagai suatu strategi yang kokoh. Hard power dengan sanksi ekonominya dan soft power dengan diplomasi unilateralnya. Hal ini semata-mata dilakukan Amerika Serikat untuk meruntuhkan pemerintahan Nicolas Maduro yang dianggap tidak pantas menduduki kursi kepresidenan Venezuela. Namun, dibalik argumen ini terselip kepentingan ekonomi-politik yang ingin dirairhnya.

REFERENSI

- Asri, M. (2015, October). *Kepentingan Amerika Serikat Dalam Mempertahankan Perdagangan Produk Apple Inc di Korea Selatan*. JOM FISIP. <https://media.neliti.com/media/publications/32763-ID-kepentingan-amerika-serikat-dalam-mempertahankan-perdagangan-produk-apple-inc-di.pdf>
- Azzam, M. A. (2019, January 28). *Australia Akui Guaido sebagai Presiden Venezuela*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/australia-akui-guaido-sebagai-presiden-venezuela/1377094>
- Bevugni, N. M. O. U., Wiranata, I. M. A., & Prameswari, A. A. A. I. (2015). Kepentingan Venezuela Untuk Membuka Kembali Foreign Direct Investment (FDI) Dari Chevron. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(3), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/12453>
- Bonita, V. (2017, November 6). *Alasan Pemberian Sanksi Executive Order Terhadap Pejabat Venezuela Masa Pemerintahan Maduro Oleh Amerika Serikat*. EJournal Ilmu Hubungan Internasional. <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2502>
- CNN Indonesia. (2019, January 24). *Ikuti AS, Negara Amerika Latin Akui Guaido Presiden Venezuela*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190124094823-134-363368/ikuti-as-negara-amerika-latin-akui-guaido-presiden-venezuela>
- Elinda, S. (2017). Alasan Tetap Dipertahankannya Program Petrocaribe Di Wilayah Karibia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 119–138. <http://journal.unair.ac.id/JAHI@alasan-tetap-dipertahankannya-program-petrocaribe-di-wilayah-karibia-article-11560-media-131-category-8.html>
- Ellsworth, B. (2017, July 31). *Venezuela's Maduro Celebrate New Assembly, Mock U.S Criticism*. Reuters. <https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN1AE0JO>
- Goldstein, J. S. (2004). *International Relations*. American University.
- Grant, S. (2016). *Cambridge International AS and A Level Economics Revision Guide* (2nd ed.). Cambridge University.
- Hanifah. (2014). *Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Bidang Energi Di Asia Tengah Periode 2003-2010* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40822>
- Hellinger, D. C. (2015). *Comparative Politics of Latin America: Democracy at Last?* Routledge.
- Hojen, L. (2015). *U.S-Venezuela Relation in the 21, Century: Sanction Against Venezuela Officials* [Aalborg University]. https://projekter.aau.dk/projekter/files/213145141/Masters_Thesis_LHojen_29.05.2015.pdf
- Kata Data. (2018, July 26). *10 Negara dengan Cadangan Terbukti Minyak Terbesar*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/26/10-negara-dengan-cadangan-terbukti-minyak-terbesar>
- Nugraha, A. (2018). *Perdamaian Dunia: Implementasi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia*. Scribd. <https://www.scribd.com/document/378264663/Perdamaian-Dunia-Implementasi-Politik-Luar-Negeri-Indonesia-dalam-Menjaga-Perdamaian-Dunia>
- Nye, J. S. (1990). Soft Power. *Foreign Policy*, 80, 153–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1148580>
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The mean to success in world politics*. Public Affair.
- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). (2017a). *OPEC Annual Statistical Bulletin 2017*. https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf
- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). (2017b). *Venezuela facts and figures*. https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm
- Papp, D. S. (1988). *Contemporary International Relations: A Framework for Understanding*.
- Plano, J. C., & R. Olton. (1999). *The International Relations Dictionary*. ABC- Clio.
- Riza, B. (2019, February 10). *3 Kondisi Memprihatinkan di Venezuela*. Tempo. <https://dunia.tempo.co/read/1174100/3-kondisi-memprihatinkan-di-venezuela>
- Roy, S. L. (1984). *Diplomasi* (Herwanto & Mirsawati (trans.)). CV Rajawali.
- Steans, J., & Pettiford, L. (2009). *Dinamika Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema* (D. S. Sari (trans.)). Pustaka Pelajar.
- U.S Treasury. (2015). *Presidential Document*. Author. <https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/13692.pdf>
- USA International Business Publications. (2007). *Venezuela Mineral & Mining Sector Investment and Business Guide*. Int'l Business Publications.
- VOA Indonesia. (2018, April 1). *Jaksa Agung Venezuela, Dunia Internasional Kecam Keras Presiden Maduro*. <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-venezuela-hadapi-kecaman-keras-temannya-dan-internasional-/3792053.html>
- VOA Indonesia. (2019a, January 31). *Trump Dukung Pemimpin Oposisi untuk Pulihkan Demokrasi di Venezuela*. <https://www.voaindonesia.com/a/trump-dukung-pemimpin-oposisi-untuk-pulihkan-demokrasi-di-venezuela/4765970.html>
- VOA Indonesia. (2019b, February 18). *Trump Peringatkan Bahaya Sosialisme dalam Pidatonya Tentang Venezuela*. <https://www.voaindonesia.com/a/trump-peringatkan-bahaya-sosialisme-dalam-pidatonya-tentang-venezuela/4791907.html>
- Wagner, C. (2005). *From Hard Power to Soft Power? Ideas, Interaction, Institutions, and Images in India's South Asia Policy* (No. 26; Heidelberg Papers in South

Asian and Comparative Politics).
<https://doi.org/https://doi.org/10.11588/heidok.00005436>

Warsito, T., & Kartikasari, W. (2007). *Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*.

Yusran. (2011). Telaah Neoliberalisme dalam Memahami Reaksi Amerika Serikat terhadap Nasionalisasi Perusahaan Minyak di Venezuela. *Jurnal Transnasional*, 6(1), 71–94. http://fisip.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSNASIONAL.VOL6_1-2011.pdf